

## KAMPUNG MARKISA BLUNYAHREJO PANEN PERDANA

# Pemkot Siapkan Paket Wisata Terintegrasi

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya menyiapkan paket wisata yang terintegrasi dan berbasis kampung. Dengan mengusung konsep Gandeng Gendong, potensi kampung yang sudah dikembangkan akan dimasukkan dalam paket wisata alternatif.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi menyebut, salah satu yang akan digulirkan pada tahun ini ialah di wilayah Gedongkiwo Mantrijeron. "Sebetulnya banyak kampung yang sebenarnya sudah siap. Akan tetapi dari sisi anggaran ada rasionalisasi sehingga baru di Gedongkiwo dulu yang berbasis kultural," katanya di sela panen perdana sekaligus peluncuran sistem pertanian perkotaan terintegrasi berawasan lingkungan di Kampung Markisa Blunyahrejo Karangwaru, Selasa (4/8).

Melalui paket wisata terintegrasi tersebut, kampung yang memiliki karakteristik dan mandiri akan ditawarkan ke wisatawan. Pihak perhotelan sudah siap untuk memberikan promo kepada para tamunya. Kemu-

dian kunjungan ke kampung-kampung menggunakan sepeda yang disiapkan oleh pihak ketiga. Sehingga entitas kampung sebagai pihak yang digandeng sedangkan hotel dan pihak ketiga sebagai korporasi merupakan pihak yang menggendong.

Heroe mengaku, keberadaan Kampung Markisa Blunyahrejo sebenarnya juga siap untuk dimasukkan dalam paket wisata dengan karakteristik pertanian perkotaan. Akan tetapi dukungan pemerintah secara lebih serius baru bisa dilakukan tahun berikutnya.

"Sekarang sudah banyak kampung yang memiliki karakteristiknya. Seperti basis budaya, pertanian, kerajinan maupun kuliner. Itu nanti akan diintegrasikan dengan pariwisata.

Sudah ada masterplannya," urainya.

Sementara Ketua Pengurus Kampung Blunyahrejo Pratito, menuturkan Kampung Markisa di wilayahnya merupakan slogan, yakni kependekan dari Mari Kita Bersatu, Bersama dan Bisa. Meski demikian pihaknya juga berencana untuk membuat wilayahnya sebagai sentra buah markisa dan aneka olahannya.

Selain itu, di Kampung Markisa para anggota kelompok tani juga memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam. Lahan seluas ribuan meter persegi itu merupakan milik warga yang statusnya pinjam pakai. Namun terdapat 2.634 meter persegi yang diperbolehkan untuk dibeli oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

"Kami secara serius memulai aksi tanam sejak Februari 2020. Ini merupakan panen perdana secara massal yang hasilnya dijual kepada warga sekitar. Tujuan kami lebih pada menjaga ketahanan pangan," katanya. (Dhi)-f



Heroe Poerwadi secara simbolis memanen hasil pertanian di Kampung Markisa Blunyahrejo. KR-Ardhi Wahdan

## DALAM RANGKA HKGB

# Bhayangkari Kota Yogya Kampanye 'Ayomi'

**YOGYA (KR)** - Pengurus Cabang Bhayangkari Kota Yogyakarta, mengkampanyekan 'Ayo Makan Ikan' (Ayomi) di Kampung Tangguh Nusantara Giwangan. Kegiatan ini dalam rangka peringatan ke-89 Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) Tahun 2020.

Ketua Bhayangkari Kota Yogyakarta, Emma R Sudjarwoko menjelaskan, kampanye Ayomi merupakan sebuah program dalam Rangka HKGB. Tujuannya untuk mengedukasi dan membentuk masyarakat yang produk-

tif serta mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.

"Kami ingin mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan makan ikan hasil budidaya sendiri. Dengan mengonsumsi ikan, diharapkan dapat menjaga imunitas tubuh sehingga bisa melawan Covid-19," jelasnya di Kampung Tangguh Nusantara Giwangan Kota Yogya, Selasa (4/8).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Yogya, Tri Kirana Muslidatun dan Ketua Persit XXXIV Kota Yogya,

Suci Tejo Widuro. Kegiatan tersebut diawali dengan penanaman pohon kelengkeng. Selain itu melukis mural di Dermaga Cinta oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kota Yogya bersama Ketua TP PKK Kota Yogya dan Ketua Persit KC. XXXIV Cabang Kota Yogya.

"Penanaman pohon ini diharapkan dapat terwujud konservasi air. Selain itu juga meningkatkan kualitas udara yang baik di lingkungan Kampung Tangguh Giwangan," terangnya.

Dalam puncak acara kegiatan kampanye Ayomi ini dengan panen raya budidaya ikan air mengalir di Kampung Tangguh Nusantara Giwangan secara bersama. Ikan tersebut kemudian dibagikan ke rumah warga di sekitar Kampung Tangguh Giwangan.

"Kami mengajak masyarakat untuk membiasakan makan ikan setiap hari. Supaya badan sehat, pikiran cerdas dan Covid-19 menjauh," tuturnya. (Sni)-f



Ketua Bhayangkari Kota Yogya saat kampanye Ayomi di Giwangan. KR-Saifulah Nur Ichwan

## MAYORITAS PENDERITA COVID-19 BERSTATUS OTG Gugus Tugas Wilayah Diminta Makin Aktif

**YOGYA (KR)** - Gugus tugas penanganan Covid-19 di wilayah diminta semakin aktif untuk melakukan monitoring. Hal ini lantaran penderita yang terkonfirmasi positif mayoritas berstatus orang tanpa gejala (OTG).

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menyebut 19 orang dari 21 orang penderita Covid-19 di Kota Yogya menjalani isolasi mandiri.

"Delapan puluh persen ialah OTG. Ini yang harus diwaspadai oleh kita semua. Dalam rapat gugus tugas kemarin, sudah saya sampaikan kepada wilayah untuk memonitor,"

terangnya, Selasa (4/8).

Penambahan kasus konfirmasi positif di Kota Yogya selama sepekan ini juga banyak dari tenaga kesehatan yang berdinasi di kabupaten lain namun domisili atau KTP Kota Yogya. Sehingga tracing atau penelusuran terhadap warga yang pernah melakukan kontak secara erat juga terus digencarkan. Termasuk dua orang tenaga teknis di lingkungan Pemkot Yogya juga menjadi perhatian utama.

Satu orang tenaga teknis yang lebih dulu terkonfirmasi positif masih ditelusuri secara ketat sumber penularannya. Pasalnya, yang bersangkutan tidak memiliki riwayat

perjalanan ke luar kota atau kontak dengan pasien positif. Akan tetapi memiliki gejala sakit sehingga harus dilakukan perawatan. Sedangkan satu orang tenaga teknis terpapar saat melakukan tugas. "Kuncinya harus saling waspada. Untuk sementara memang hindari bersalaman dulu. Ketika berkomunikasi juga menjaga jarak dan selalu cuci tangan setelah melakukan apa pun," imbuh Heroe.

Terkait upaya tracing dan blocking yang digencarkan, Pemkot telah memiliki skema siapa saja yang dilakukan rapid test atau langsung uji swab.

(Dhi)-f

## RENCANA REKRUTMEN PPPK

# Atasi Kekurangan 700.000 Guru

**YOGYA (KR)** - Rencana Kemendikbud untuk membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna mengisi kekurangan tenaga 700 ribu guru di seluruh Indonesia, sebetulnya cukup bagus. Meski begitu alangkah baiknya apabila pemerintah untuk serius dalam proses rekrutmen PPPK untuk kebutuhan guru tersebut. Pasalnya, hasil seleksi PPPK pada akhir 2018 lalu, masih menyisakan sejumlah persoalan karena belum semua guru mendapat surat keputusan pengangkatan.

"Sebetulnya sudah lama sejumlah pihak, termasuk PGRI memberi sinyal bahwa Indonesia akan mengalami kekurangan guru. Namun pemerintah kurang cepat merespons, dengan segera menerima guru baru.

Walaupun sebelumnya pernah dilakukan pengangkatan guru bantu dan honorer K1 dan K2, namun di beberapa daerah masih ada K2 yang belum diangkat dengan berbagai permasalahan," kata pengamat pendidikan sekaligus mantan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY, Ahmad Zainal Fanani SPd MA di Yogyakarta, Selasa (4/8).

Menurut Ahmad Zainal Fanani, pengangkatan PPPK memang sudah saatnya dilakukan. Karena jika dicermati, kekurangan guru yang saat ini terjadi tergolong cukup banyak dan perlu segera dicarikan solusi secara cepat. Karena guru yang diangkat PNS pada tahun 1978 hingga 1984 sudah hampir habis (pensium), terutama untuk guru SD.

"Mudah-mudahan pemerintah segera menyelesaikan sisa-sisa persoalan PPPK di tahun 2018 dengan tuntas dan memulai lagi membuka sistem PPPK baru. Sebab jika tidak, kepala sekolah khususnya sekolah negeri akan mengalami kesulitan dalam penerimaan honorer. Walaupun sekarang guru PNS yang ditempatkan di sekolah swasta sudah tidak banyak. Karena sudah ditarik untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah negeri," papar Zainal Fanani.

Mantan Ketua PGRI DIY itu menyatakan, adanya rekrutmen tersebut dilakukan agar pemerintah memberi porsi lebih bagi mereka yang selama ini telah menjadi guru honorer. Sehingga masa kerjanya

bisa dihargai, namun bagi lulusan baru tetap diberi kesempatan untuk ikut tes. Tentunya semua tahapan berkaitan dengan itu harus dilakukan secara objektif dan transparan. Konsekuensi dari itu adanya titipan-titipan dari berbagai kalangan seperti teman dekat atau pejabat harus dihindari. Semua itu penting, supaya proses penerimaan guru PPPK lebih bersih dan adil.

(Ria)-f

## GM FKPPi DIY Bagikan Masker

**YOGYA (KR)** - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (GM FKPPi) DIY, membagikan ribuan masker dan botol minum kepada masyarakat pengguna jalan di kawasan Tugu Pal Putih Yogyakarta, Senin (3/8).

Menurut Ketua Pengurus Daerah XII GM FKPPi DIY, Faried Jayen Soepardjan, aksi membagikan masker ini merupakan bentuk dukungan terhadap instruksi Presiden Jokowi yang meminta kampanye memakai masker dilakukan secara masif selama dua minggu ke depan.

"Begitu ada instruksi dari Presiden, kami langsung berusaha bergerak. Selama 14 hari kedepan kami akan terus mengkampanyekan masyarakat menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah," ujar Jayen di sela aksi. Adapun pembagian bo-



GM FKPPi DIY membagikan masker dan botol minum. KR-Devid Permana

tol minum, disebut Jayen sengaja dibagikan agar masyarakat bisa membawa air minum dari rumah sehingga lebih steril. Selain itu juga bisa mengurangi penggunaan plastik, sehingga lebih ramah lingkungan.

"Kalau ada masyarakat yang kesulitan masker silakan hubungi kami. Kami ingin ingatkan juga agar masyarakat disiplin menaati protokol kesehatan sehingga pandemi Covid-19 ini lekas usai,"

tegas Jayen. Jayen menilai saat ini kondisi psikologis masyarakat berbeda dengan di awal-awal pandemi. Jayen menilai saat ini masyarakat mulai kendor ke-disiplinannya dalam melawan Covid-19.

"Saya mengingatkan masyarakat agar jangan terlena dan tetap disiplin pada protokol kesehatan Covid-19. Mari kita lawan bersama virus Korona ini," pungkasnya. (Dev)-f



## DPRD KOTA YOGYAKARTA

# SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

### PEMKOT PERLU PERKUAT INVENTARISASI

## Lahan Tak Dimanfaatkan Harus Terpetakan

**YOGYA (KR)** - Pertanian di Kota Yogya masih menjadi persoalan pelik. Satu sisi lahan kosong dengan luasan memadai untuk kepentingan publik sulit dicari. Namun di sisi lain, tidak sedikit tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga terkesan lahan liar. Lahan yang tidak dimanfaatkan dalam kurun waktu lama pun harus bisa terpetakan oleh pemerintah.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya Wisnu Sabdono Putro SH, mengungkapkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan sempat diatur kewenangan pemerintah terhadap lahan terutama status Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan dalam waktu 20 tahun dapat dicabut statusnya untuk kepentingan pemerintah. "Sekarang Pemkot harus memperkuat inventarisasi. Data semua lahan yang sudah lama tidak dimanfaatkan, termasuk bagaimana statusnya," tandasnya.

Sekretaris Komisi A ini menilai, meski RUU Pertanahan belum jadi disahkan pada akhir 2019 lalu, namun antisipasi harus dilakukan. Dirinya pun mengapresiasi program pendataan tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan

"Harga tanah di Kota Yogya setiap tahun semakin tinggi. Jangan sampai lahan yang masih tersisa untuk kepentingan komersil. Kebutuhan papan dan ruang terbuka publik harus diakomodasi oleh pemerintah," imbuhnya.

Selain itu, inventarisasi tanah atau lahan kosong harus tetap melibatkan pihak lain seperti Kraton, Pakualaman maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika seluruh lahan kosong sudah mampu terpetakan mulai dari luasan, lokasi, akses hingga status kepemilikannya kelak akan memudahkan Pemkot dalam mengambil kebijakan.

Terutama program pembelian tanah warga untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik. Menurut Wisnu, Pemkot sudah menerima tumpukan proposal dari warga yang tanahnya bersedia dibeli oleh pemerintah. Kendati selama masa pandemi Covid-19 terjadi rasionalisasi anggaran, namun program itu harus tetap berjalan dengan skala prioritas.

"Idealnya setiap kampung tersedia ruang terbuka sebagai wahana interaksi sosial antar warga. Jangan sampai warga kesulitan mengakses ruang publik sementara di wilayahnya ada lahan yang sudah lama terbengkalai," katanya. (Dhi)-f



**Wisnu Sabdono Putro SH**  
KR-Istimewa